



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **BUMN/BUMD**
LEMBAGA : **PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**
UNIT KERJA : **SATUAN PENGAWASAN INTERN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ZULFIKAR**
2. Jabatan : **HEAD OF SATUAN PENGAWASAN INTERN**
3. NHK : **823383**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.850.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 248 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 281 m2/150 m2 di KAB / KOTA BATURAJA, WARISAN Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 100.000 m2/25 m2 di KAB / KOTA ---, WARISAN Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **353.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA FINO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, MAZDA BIANTE Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



3. MOTOR, HONDA ADV 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
34.000.000

4. MOBIL, CHEVROLATE TRAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 147.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 9.475.000.000

III. HUTANG Rp. 530.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.945.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.